**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL TUNAI**

**DALAM MENGATASI MASALAH AKIBAT COVID-19**

**DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Najib Gilang Rusydi

NPP. 29.0685

*Asdaf Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: [29.0685@praja.ipdn.ac.id](mailto:29.0685@praja.ipdn.ac.id)

**ABSTRACT (in engslish)**

*The presence of Corona virus Disease (covid-19) raises concerns among the community and affects the economic sector. A form of state concern during the Covid-19 pandemic by creating a BST program. Cash Social Assistance (BST) is a program from the government to provide cash assistance to families who are unable, poor and affected by the COVID-19 outbreak. This assistance is given to families whose names are recorded in the beneficiary family (KPM) of BST. The problem in research is that there is still no distribution of aid funds to the community 100% this is due to data that is not updated with existing community conditions. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach that describes the data obtained in the field and explains it in the form of words. This study used Van Meter and Van Horn's theory by looking at six variables, namely policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, communication between organizations and strengthening activities, attitudes of implementers, social and political conditions. The implementation of Cash Social Assistance (BST) in Bekasi City is in accordance with health protocols, only there are still crowds that occur during the distribution process. This research aims to determine the implementation of Cash Social Assistance (BST) in Bekasi City where this assistance must be utilized as well as possible by KPM BST to reduce the burden of people's lives due to the impact of corona virus disease (covid-19) based on the data that has been collected it can be concluded that The Cash Social Assistance (BST) of Bekasi City is still not running effectively and optimally. The author's advice regarding the implementation of BST is that the Bekasi City Social Service has more concerns about how to validate data can run well and for the public to participate in the implementation in an orderly manner avoid crowds and implement health protocols.*

***Keywords: Implementation, Cash Social Assistance, Covid-19***

**ABSTRAK**

Hadirnya *Corona virus Disease (covid-19)* menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat dan mempengaruhi sektor ekonomi. Bentuk kepedulian negara pada saat pandemi covid-19 dengan membuat program BST. Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program dari pemerintah berjenis pemberian bantuan uang secara tunai kepada keluarga tidak mampu, miskin dan terkena dampak dari wabah *COVID-19.* Bantuanini diberikan kepada keluarga yang namanya tercatat dalam keluarga penerima manfaat (KPM) BST. Permasalahan dalam penelitian adalah masih belum tersalurkannya dana bantuan kepada masyarakat secara 100% hal ini dikarenakan data yang tidak update dengan kondisi masyarakat yang ada. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan data yang didapat di lapangan dan mejelaskannya dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan melihat enam variable yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, sikap para pelaksana, kondisi ekomi sosial dan politik. Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Bekasi sudah sesuai dengan protokol kesehatan hanya saja masih terdapat kerumunan yang terjadi saat proses penyaluran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kota Bekasi dimana bantuan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KPM BST untuk mengurangi beban hidup masyarakat akibat terkena dampak corona virus disease (*covid-19)* berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) Kota Bekasi masih belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Adapun saran penulis mengenai pelaksanaan BST adalah Dinas Sosial Kota Bekasi lebih memikirikan lagi bagaimana cara agar validasi data bisa berjalan dengan baik dan untuk masyarakat bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan dengan tertib hindari kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan

**Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Sosial Tunai, Covid-19**

1. **PENDAHULUAN (15-20%)**
   1. **Latar Belakang**

Tahun 2020 terjadi merebaknya virus yang menular, virus ini pertama kali menyerang di Wuhan China selanjutnya disebut sebagai virus corona atau dalam ilmu kedokteran dinamakan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19). Virus ini tersebar begitu cepat dan sudah menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Jumlah orang yang divonis positif Covid-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan. Dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona, pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya seperti ditetapkannya wabah virus corona disease sebagai halnya bencana nasional. Selain itu pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang sudah dinyatakan zona merah yang telah ditetapkan sesuai peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 terkait instruktur PSBB. Dengan harapan terputusnya rantai penyebaran Covid-19. Dengan berlakunya peraturan ini menghimbau masyarakat agar tidak berkerumunan dengan orang banyak artinya mereka harus saling menjaga jarak, mengurangi seluruh kegiatan yang berada di luar rumah sekalipun dalam hal mencukupi kebutuhan[[1]](#footnote-1).

Dengan demikian PSBB justru membawa dampak bagi masyarakat indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah penurunan perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya pertokoan dipaksa untuk tutup, tempat wisata pun dipaksa untuk tutup sementara waktu. Bukan hanya itu saja, pemutusan hubungan kerja juga terjadi di berbagai daerah, hasil pemasukan di pasar menurun. Jika kondisi seperti ini tidak diantisipasi dengan baik maka kemungkinan besar yang terjadi adalah ketidakstabilan perekonomian di Indonesia yang cenderung menurunnya kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi yang mengalami penurunan akibat Covid-19 pemerintah menggelontorkan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak Covid-19[[2]](#footnote-2).

Virus Covid-19 merupakan sebuah virus yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat dunia khususnya Rakyat Indonesia. Semua negara sedang berjuang melawan Virus Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian dunia. Setiap orang harus berpartisipasi dalam melakukan pencegahan terhadap Virus Covid-19 dengan menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan.

memandang bahwa seluruh negara yang terkena didunia ini belum bisa mengatasi taupun keluar dari jeratan covid-19 pandemi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Yunani yang berarti *“pan”* yang memeiliki arti semua dan *demos* yang memiliki arti manusia virus ini merupakan epidemic yang menyebar ke antar benua dan hampir semua nega. Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan. Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terutama dalam sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Khususnya di Provinsi Jawa Barat dimana 2 orang warga Indonesia terjangkit virus corona pertama kali. Setelah Virus Covid-19 mewabah di Indonesia, jumlah masyarakat di Indonesia yang terinfeksi dan meninggal semakin bertambah setiap harinya,

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

ada beberapa permasalahan yang ada pada pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kota Bekasi mulai dari beberapa warga yang dikatakan layak mendapatkan tetapi malah tidak mendapatkan, ada beberapa warga yang sudah pindah tetapi masih tercatat Namanya sebagai penerima bantuan sehingga ini membuat bantuan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah pusat terpaksa harus dikembalikan karena ada masyarakat yang tidak datang dengan persyaratan yang telah dibuat sebagai syarat pengambilan dari Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia (SDM) yang ada pada kementrian sosial serta teknologi yang dimiliki oleh kemensos yang tidak mengupdate data terbaru dari penerima BST sehingga pada saat pelaksanaannya tidak tersalurkan secara efektif banyak sekali jumlah uang yang harus dikembalikan kembali kepada kemensos padahal bantuan ini cukup membantu menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemic covid-19.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait judul Implementasi Bantuan Sosial Tunai Dalam Mengatasi Masalah Akibat Covid-19 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu:

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus (Iqbal, 2010) Hasil skripsi ini adalah pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti kebijakan bantuan tunai. Dan perbedaan dengan penelitian ini adalah kebijakannya, penelitian terdahulu meneliti kebijakan dari pemerintah daerah, dan di penelitian ini kebijakan dari Pemerintah Pusat

Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa (Laloan 2021). Hasil jurnal ini adalah bahwa terdapat pengaruh dari variable implementasi kebijakan terhadap variabel kesejahteraan sosial Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantiatif yang menjadi objek adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial di kecamatan Kawangkoan kabupaten Minahasa. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti kebijakan pemberian bantuan. Dan perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis bantuannya penelitian terdahulu meneliti bantuan sosial, baik sembako dan uang tunai. Pada penelitian ini meneliti hanya berfokus pada Bantuan Sosial Tunai, perbedaan juga ada di teknik analisis penelitian.

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak (Nurahmawati & Hartini, 2020)

Hasil jurnal ini bahwa hasil dari kuisioner ke 1, menunjukan bahwa 80% warga Cibadak Raya Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sudah menerima bantuan dari pemerintah bagi warga terdampak covid-19. Hasil dari kuisioner ke 2 menunjukan 80% cukup terbantu dengan pembagian bantuan dari pemerintah ini. Hasil dari kuisioner ke 3 menunjukan bahwa bantuan dari pemerintah terdampak covid didesa ini tidak hanya berupa uang tunai akan tetapi lebih banyak juga warga juga yang mendapatkan sembako. kuisioner ke4 yaitu menunjukan bahwa 80% warga menerima bantuan dengan tepat waktu Metode yang digunakan adalah Kuantitatif. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti kebijakan bantuan tunai. Dan perbedaan dengan penelitian ini adalah kebijakannya, penelitian terdahulu meneliti kebijakan dari pemerintah daerah, dan di penelitian ini kebijakan dari Pemerintah Pusat. Perbedaan juga ada di teknik pengumpulan data.

Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (Mulyadi A. , 2019)

Hasil penelitian ini belum berjalan sesuai dengan aturan karena dapat dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, jumlah sumber daya manusia yang masih kurang, karakteristik pelaksana yang tidak mengetahui adanya aturan mengenai BPNT dan tidak adanya komunikasi antar dinas terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti kebijakan pemberian bantuan. Perbedaannya adalah jenis bantuan yang disalurkan.

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu) (DWI AYU FEBIOLA, 2021).

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa pemberian bantuan pada Kota Batu sering terlambat hal ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait jenis bantuan-bantuan yang ada pada saat pandemic covid-19. Dalam penelitian ini peneliti peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel sumber data menggunakan purposive sampling. Persamaan pada penelitian ini adalah jenis bantuan yang diberikan yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST).

* 1. **Tujuan.**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam mengatasi masalah ekonomi akibat covid-19 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam mengatasi masalah ekonomi akibat covid-19 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat?
3. **METODE**

Metode yang peneliti gunakan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membahas tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, tindakan dan perilaku yang terjadi dilapangan.

Pendekatan kualitatif adalah untuk memecahkan masalah yang paling nyata dalam situasi dan kenyataan, yang terjadi dan yang menjadi alasan mengapa, serta fakta bahwa kita mengalami fenomena fenomenal, kita tidak benar. Jenis pembersihan ini dilakukan dengan sangat efisien, melindungi bangunan utama, yang terletak di kamar-kamar yang ada, dan secara kualitatif berdasarkan desain bangunan.

Alasan pemilihan metode kualitatif adalah karena pengumpulan data didasarkan pada pendapat berdasarkan data yang ada dan bukan pendapat yang berasal dari peneliti. Selain itu, metode kualitatif mengambil data berupa data deskriptif berupa font, dokumen dan kata-kata dari informan dan sumber yang sudah diteliti dan dapat dipercaya keasliannya.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada paradigma konstruktivisme dan fenomenologis dalam ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Penelitian dilakukan pada objek alam yang berkembang sebagaimana adanya, peneliti tidak memanipulasi, dan peneliti juga tidak memiliki pengaruh terhadap dinamika objek. Alat penelitian kualitatif adalah orang atau alat manusia, khususnya peneliti itu sendiri, yang harus memiliki pengetahuan dan teori yang luas untuk mengajukan pertanyaan, memotret, menganalisis, dan menciptakan kondisi sosial agar jelas dan bermakna. Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan luas tentang kondisi sosial di lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan digabungkan, sedangkan analisis data induktif yang digunakan merumuskan fakta di lapangan ke dalam hipotesis. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016, p. 8).[[3]](#footnote-3)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai dalam mengatasi masalah ekonomi akibat *Covid-19* di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam melakukan penelitian ini harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan tersebut.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

**3.1 Kondisi Geografis**

Kota Bekasi didirikan pada tahun 1997, dan antara tahun 2001 dan 2004 Kota Bekasi dibagi menjadi 10 kecamatan dan 52 kelurahan. Namun menurut Peraturan Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kelurahan, Kota Bekashi terdiri dari 12 Kelurahan dan 56 Kelurahan, dengan luas wilayah 21.049.000 Km2. Secara geografis Kota Bekashi terletak antara 106o48'28"-107o27'29" BT dan 6o10'6"-6o30'6" LS. Kota Bekasi juga memiliki kemiringan 0 hingga 2% dan merupakan wilayah 11 hingga 81 di atas permukaan laut. Lokasi Bekasi sangat strategis. Hal ini karena kota Bekasi dekat dengan ibu kota, DKI Jakarta. Letak kota Bekasi yang dekat dengan ibu kota negara memberikan keunggulan tersendiri bagi kota ini yaitu dalam bidang komunikasi dan transportasi. Bobot yang ringan dan keutuhan kendaraan dan infrastruktur milik kota Bekasi menjadikannya sebagai ibu kota Indonesia, salah satu daerah perimbangan DKI Jakarta.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2. Kota Bekasi terdiri dalam 12 kecamatan yang terdapat di dalam wilayah kota Bekasi antara lain Kecamatan Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, mustika jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, dan Bekasi Utara. Kecamatan Mustika Jaya merupakan kecamatan dengan luas wilayah terluas yaitu sekitar 24,73 km2, sedangkan Kecamatan Bekasi Timur adalah kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 12,49 km2. Wilayah Kota Bekasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

### 3.2 Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan mengenai pelaksanaan penyaluran BST dalam penanganan dampak pandemic *Coronavirus disease* 2019 di kota Bekasi provinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 yaitu Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat nonpenerima program sembako dan nonpenerima program keluarga harapan, Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kota Bekasi provinsi Jawa barat setiap penerima Santuan Sosial Tunai sebesar Rp. 300.000 perbulan. Data keluarga penerima manfaat bantuan tunai berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Usulan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota yang diusulkan melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai. Peserta penerima bantuan sosial tunai yang berasal dari usulan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota dan dari sumber lain diserahkan dan dikelola Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan penelitian di lapangan, dan hasil wawancara dengan bapak Zaenal Ketua RT 09 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mengatakan kriteria masyarakat yang berhak menerima Bantuan Sosial Tunai yaitu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya pada pandemic covid-19[[4]](#footnote-4). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cahyo ketua Rw 12 kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mengatakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan di data kembali, RT dan RW akan melaporkan data terbaru masyarakat penerima bantuan social tunai ke situs kementrian sosial[[5]](#footnote-5). Setelah dilakukan pendataan ulang oleh ketua RT dan RW dapat mencegah terjadinya salah sasaran pemberian Bantuan sosial tunai kepada masyarakat mampu atau masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerimaan bantuan sosial tunai saat masa pandemic covid-19 ini.

**3.3 Sumber Daya**

Penyaluran BST di kota bekasi didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Untuk sumber daya manusia dalam penyaluran BST di kota bekasi yaitu pendataan yang dilakukan oleh ketua RT dan RW dalam mengumpulkan data masyarakat yang layak untuk menerima BST di masa pandemi covid-19. Data yang dimiliki oleh ketua RT dan ketua RW adalah data terbaru sesuai dengan kenyataan di lapangan saat masa pandemi covid-19. Lalu data tersebut diinput ke situs Kemensos, agar data pada Kemensos terupdate sehingga penerima Bantuan Sosial Tunai diperbaharui. Namun saat pemanfaatan sumber daya non manusia, seperti system kemensos yang digunakan, setelah ketua RT dan RW menginput data ke situs kemensos, data tidak terupdate dan nama penerima bantuan sosial tunai adalah data lama yang kepastian datanya tidak bisa dipastikan, sehingga pada tabel 4.2 di alokasi dana Bantuan Sosial Tunai, ada dana yang tidak berhasil disalurkan dikarenakan ada warga sudah pindah rumah bahkan sudah meninggal dunia.

**3.4 Karakteristik Agen Pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat dalam mengimplementasian kebijakan publik. Setelah melakukan wawancara dengan pelaksana penyaluran bantuan sosial tunai kelompok-kelompok yang terlibat langsung dalam penyaluran dan pendataan masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai sangat mendukung kebijakan ini sehingga program pemerintah dapat berjalan lancar. Masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai juga sangat mengapresiasi program Bantuan Sosial Tunai tersebut dengan mengikuti tahapan–tahapan yang sudah ditentukan oleh agen pelaksana.

**3.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Penguatan Aktivitas**

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Dalam wawancara dengan ketua RW 12 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Mengatakan komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana berlangsung dengan baik, penyampaian tentang rencana penyaluran bantuan sosial tunai dapat dipahami sehingga tidak menghambat pengimplementasian dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai. Dilakukan koordinasi antara kemensos dan agen pelaksana lainnya, sehingga saat penyaluran dana bantuan tunai tepat sasaran sesuai dengan data yang diberikan oleh Kemensos.

Dalam penyaluran dana bantuan sosial tunai ini juga dibantu oleh PT. POS Indonesia, dimana pengambilan dana sosial tunai juga bisa dilakukan di PT POS. sesuai dengan data yang diberikan kemensos dan tidak dapat diwakilkan. Sehingga dana yang tidak berhasil disalurkan akan dikembalikan lagi ke Kemensos.

**3.6 Sikap Para Pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn penerimaan atau penolakan dari agent pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan penyaluran bantuan sosial tunai pada masa covid-19 ini. Hal ini sangat bisa terjadi mengingat bahwa penyaluran dana bantuan sosial tunai adalah tanggung jawab yang besar. Dimana sikap para pelaksana adalah ujung tombak kesuksesan dalam penyaluran bantuan sosial tunai. Sikap para pelaksana yang responsive dan cooperative sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program bantuan dari kemensos ini.

Dalam pengimplementasian program kebijakan ini, peneliti menemukan dimana sikap para agen pelaksana sudah sangat baik, dilihat dari keberhasilan penyaluran bantuan sosial tunai sebesar 94,5% ketidak berhasilan penyaluran dana bantan sosial tunai sebesar 4,5% dipengaruhi oleh faktor lain seperti sumber daya manusia pada Kementrian Sosial dan juga kekurangan pada system kemensos yang mengeluarkan data lama, dimana masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai tidak di cek kembali oleh agen pelaksa apakah masih tinggal di daerah tersebut, masyarakat tidak mengetahui mendapat bantuan sosial tunai atau bahkan sudah meninggal.

**3.2.7 Kondisi Ekonomi, sosial dan Politik**

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Sejak masuknya pandemi Covid-19 awal Maret 2020 di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi, selain sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Terjadinya pekerja/buruh yang dirumahkan, diliburkan, bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan sebagai akibat sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti produksi

**3.3. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

### 3.3.1 Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dampak yang terjadi akibat pandemic covid-19 sangat berarti di segala aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek ekonomi setelah covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membuat ekonomi masyarakat di Indonesia menjadi terpuruk khususnya di Kota Bekasi banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada tahun 2020 pemerintah pusat mengeluarkan satu program khusus nonregular yang dinamakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Program ini adalah program yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM), dengan Kemensos Republik Indonesia sebagai penanggung jawab dari penyaluran tersebut.

Dalam proses penyaluran BST, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi basis data acuan dalam penentuan data-data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikirim oleh Kementrian Sosial dan melalui DInas Sosial Kota Bekasi data tersebut diberikan kepada kelurahan masing-masing untuk dilakukan verivikasi guna melihat kelayakan nama-nama calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata sebagai peneroma bantuan tersebut kemudian setelah selesai diserahkan kembali kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verivikasi dan validasi.

### 3.3.2 Kurangnya Sumber Daya Dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai.

Dalam penyaluran program bantuan sosial tunai di kota Bekasi membutuhkan sumber daya yang ikut serta dalam menyukseskan program tersebut antara lain adalah sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya non manusia seperti teknologi yang dipergunakan oleh Kemensos untuk mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut memerlukan maintenance atau pembaharuan teknologi dikarenakan data yang diinput oleh ketua RT dan RW yang telah didata dan diobservasi di lapangan, yang berhak mendapatkan bantuan sosial tunai setelah diinput ke situs Kemensos namun data yang keluar masih data lama. Data lama tersebut adalah data yang sudah pernah mendapatkan bantuan sosial dunia tunai namun tidak pada masa covid yang mengakibatkan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan sosial tunai di masa pandemi covid 19 ini tidak mendapatkan bantuan tersebut karena namanya tidak keluar di data Kemensos. Beberapa masyarakat yang sudah meninggal pindah rumah namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai tersebut.

Dalam wawancara dengan Ketua RW 12 Mengatakan bahwa masyarakat yang sudah didata namun namanya tidak keluar di Kemensos untuk mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut merasa kecewa dan dan ingin mendaftarkan kembali dirinya sebagai penerima bantuan sosial tunai yang diprogramkan oleh kementerian sosial. Bapak Cahyo sebagai ketua RW 12 tidak bisa bisa melakukan upaya yang lebih untuk mendaftarkan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut dikarenakan tidak ada koordinasi antara kementerian sosial tentang permasalahan situs Kemensos yang mengeluarkan data lama.

### 3.3.3 Kurangnya Sikap Respon dari Agen Pelaksana dalam Pengimplementasian Program Bantuan Sosial Tunai.

Dalam menyukseskan program bantuan sosial tunai dimana sikap para pelaksana adalah ujung tombak kesuksesan dalam penyaluran bantuan sosial tunai. Sikap para pelaksana yang *responsive* dan *cooperative* sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program bantuan dari kemensos ini. Dalam wawancara dengan bapak ketua RT dan RW yang mengatakan data yang dikirim Kemensos adalah data lama, tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah input terupdate yang berhak mendapatkan bantuan sosial tunai.

ketidakberhasilan penyaluran dana bantan sosial tunai sebesar 4,5% di kota bekasi dikarenakan tidak ada respon dari kemensos setelah ketua RT dan RW mengatakan bahwa data yang kemensos berikan adalah data lama. Sikap agen pelaksana yang tidak kooperatif dan responsive tersebut menyebabkan 4,5% dana tidak tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

**3.3.4. Diskusi** **Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

### Penulis menemukan faktor Standar dan Sasaran Kebijakan mengenai pelaksanaan penyaluran BST dalam penanganan dampak pandemic *Coronavirus disease* 2019 di kota Bekasi provinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 yaitu Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat nonpenerima program sembako dan nonpenerima program keluarga harapan, Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kota Bekasi provinsi Jawa barat setiap penerima Santuan Sosial Tunai sebesar Rp. 300.000 perbulan. Data keluarga penerima manfaat bantuan tunai berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Usulan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota yang diusulkan melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai. Peserta penerima bantuan sosial tunai yang berasal dari usulan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota dan dari sumber lain diserahkan dan dikelola Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan penelitian di lapangan, dan hasil wawancara dengan bapak Zaenal Ketua RT 09 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mengatakan kriteria masyarakat yang berhak menerima Bantuan Sosial Tunai yaitu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya pada pandemic covid-19[[6]](#footnote-6). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cahyo ketua Rw 12 kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mengatakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan di data kembali, RT dan RW akan melaporkan data terbaru masyarakat penerima bantuan social tunai ke situs kementrian sosial[[7]](#footnote-7). Setelah dilakukan pendataan ulang oleh ketua RT dan RW dapat mencegah terjadinya salah sasaran pemberian Bantuan sosial tunai kepada masyarakat mampu atau masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerimaan bantuan sosial tunai saat masa pandemic covid-19 ini.

1. **KESIMPULAN**

Penelitian ini membahas tentang Implementasi dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat. Program bantuan sosial yang pemerintah lakukan dalam rangka membantu kondisi ekonomi pada masyarakat yang terkena pandemi covid 19 yaitu Bantuan Sosial Tunai BST sebesar Rp. 300.000 di Kota Bekasi. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

1. Implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanismenya, peneliti menemukan bahwa sasaran kebijakan bantuan sosial tunai di Kota Bekasi yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi covid 19, ketua RT dan RW akan melaporkan data terbaru masyarakat yang berhak menerima bantuan salah satu nilai tersebut ke situs kementerian sosial sehingga bantuan sosial tunai tersebut tidak salah sasaran. Kota Bekasi terdapat 12 kecamatan yang yang sudah dilakukan penyaluran bantuan sosial tunai, dari 100% hanya 94,5% yang berhasil disalurkan. sisa alokasi dana tersebut dikembalikan ke kementerian sosial oleh PT pos.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) Memiliki kekurangan pada sumber daya sehingga terjadi hambatan dalam penyaluran dana bantuan sosial sebesar 4,5% hal ini dikarenakan data terbaru yang di input agen pelaksana yaitu ketua RT dan RW setempat ke situs kemensos, namun data yang keluar dari kemensos adalah data lama. Sehingga masyarakat yang terdapat pada data tersebut ada yang sudah pindah, bahkan ada yang sudah meninggal sehingga dana yang tidak tersalurkan dikembalikan kembali ke Kementrian Sosial. Dalam penelitian ini, karakteristik agen pelaksana yaitu pihak pihak yang ikut serta dalam pengimplementasian bantuan sosial tunai

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Diatas menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemda Bekasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

BBC. (25, April 24). *Ekonomi pandemi: Penyaluran bantuan sosial 'ke orang yang sudah meninggal', skema kebijakan dinilai 'tidak tepat sasaran'*. Retrieved from www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52399147

kelaspintar.id. (2020, april 1). *Virus Corona Jadi Pandemi Global, Apa Sih Pengertian Pandemi?* Retrieved from https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/virus-corona-jadi-pandemi-global-apa-sih-pengertian-pandemi-3854/

Kompas.com. (2020, maret 3). *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>

Nurulliah, N. (2021, Januari 4). *BST Rp300.000 Cair Bulan Ini, Total 7,4 Juta KPM di Jawa Barat Dapat Bantuan Tunai Pemerintah Pusat*. Retrieved from Pikiran-rakyat.com: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-011216798/bst-rp300000-cair-bulan-ini-total-74-juta-kpm-di-jawa-barat-dapat-bantuan-tunai-pemerintah-pusat

pikobar.jabarprov.go.id. (2021, september 20). *Dashboard Statistik Kasus Covid-19 Provinsi Jawa Barat*. Retrieved from Pusat Informasi dan Koordinasi Covid 19: https://pikobar.jabarprov.go.id/data

Stefany, G. (2020, Maret 12). *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global*. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all

Khadijah, U. L. S., Rejeki, D. S., Sukaesih, S., & Anwar, R. K. (2016). Literasi Informasi Motivasi Berwirausaha Ibu Rumah Tangga Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang Barat. *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, *4*(2), 149. https://doi.org/10.24198/jkip.v4i2.8491

Kompas.com. (2008). *Merantau Bagi Orang Bugis untuk Kebebasan*. https://nasional.kompas.com/read/2008/06/10/20422993/merantau.bagi.orang.bugis.untuk.kebebasan

Lien, D. A. Gunawan, A. W. Aruan, D. A. Kusuma, S. & Adriyanto, S. (2020). *Literasi Informasi: 7 Langkah Knowledge Management*. Grafindo. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nxbLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA24&dq=pengertian+literasi+informasi&ots=7ZpAQiGUUJ&sig=79AhkzVpqdD2KLDpFx5yXJTKtRE&redir\_esc=y#v=snippet&q=literasi&f=false

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)